



**BULETIN**

# **PARLEMENTARIA**

NOMOR: 828/VIII/2014

II/AGUSTUS 2014



## **Pimpinan DPR Terima Bintang Mahaputera Adipradana**

# KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KEDUA AGUSTUS 2014

Minggu kedua di bulan Agustus 2014 fokus pada kegiatan DPR RI, yaitu Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-69 Kemerdekaan RI tahun 2014. Terdapat pula acara pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan I TS 2014. Selain dua agenda tersebut, juga dilaporkan kegiatan pelaksanaan Prolegnas 2014 dan Laporan Hasil Penelaahan BAKN DPR RI.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

## Sidang Bersama DPR RI dan DPD

Adapun intisari pidato Ketua DPR RI pada pidato pengantar sidang paripurna pagi hari, Ketua menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan peringatan kemerdekaan RI ke-69. Ketua mengatakan bahwa bagi seluruh bangsa Indonesia, memperingati hari kemerdekaan dilakukan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan YME, sekaligus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pejuang bangsa yang telah mengantarkan kemerdekaan dengan darah dan nyawa, serta telah meletakkan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peringatan kemerdekaan ke-69 harus menjadi momentum yang berharga, karena menjelang peringatan ini telah berlangsung dua Pemilu, yaitu Pemilu legislatif pada 9 April dan Pemilu Presiden/Wapres pada tanggal 9 Juli. Kedua pemilu telah berjalan dengan lancar dan aman, menunjukkan kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Pada Pemilu legislatif, telah menghasilkan anggota-anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi juga DPRD Kabupaten/Kota yang akan menjadi wakil rakyat dalam lima tahun kedepan. Terdapat beberapa permasalahan yang memprihatinkan dalam pileg, dan harus menjadi pembelajaran, khususnya untuk penyelenggara pemilu agar pileg dalam 5 tahun ke depan dapat semakin berkualitas. Pelaksanaan pilpres juga telah berjalan dengan lancar, namun hasilnya masih menunggu putusan MK,



karena terdapat sengketa pilpres yang sedang digugat ke MK. Ketua menekankan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mendatang harus mampu bersinergi dengan lembaga lainnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, agar mekanisme *check and balances* dapat diwujudkan dengan baik.

Dalam pidatonya, Ketua juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ruang demokrasi telah dibuka lebar melalui amandemen UUD 1945 dan perundangan lainnya. Peradaban demokrasi harus terus dibangun yang bersandikan pada hakikat kemanusiaan dan keadilan sosial, menjunjung tinggi hukum dan HAM juga memberikan penghargaan pada keberagaman, pluralisme dan penguatan bagi *nation and character building*.

## Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I

Pada siang hari, Ketua membuka masa persidangan I Tahun Sidang 2014 yang dihadiri pula oleh DPD RI. Pada pidato Ketua, berintikan laporan kegiatan dewan dalam masa persidangan ke-I dengan pelaksanaan tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Pada fungsi anggaran, Ketua menyampaikan bahwa DPR dan Pemerintah telah menyusun RUU APBN Tahun 2015 dan nota keuangan pada masa persidangan ke-IV yang lalu, melalui mekanisme pembicaraan pendahuluan. Ketua

mengatakan bahwa RAPBN 2015 memiliki makna khusus, selain merupakan APBN transisi yang hanya memuat base-line dan memberikan ruang bagi pemerintahan baru yang nantinya dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan misi dan visinya. Dewan melalui pidato Ketua mengingatkan Pemerintah agar benar-benar dapat menjalankan amanat dan UU. Bahwa Pemerintah harus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah, yang tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran serta memperkecil kesenjangan nasional.

Dewan juga melihat bahwa politik anggaran harus tetap bersandar pada tujuan pembangunan nasional yakni untuk kemakmuran rakyat banyak. Dewan juga senantiasa cermat melihat dan berupaya agar postur dan struktur APBN harus sehat dan berkesinambungan dengan beberapa indikator seperti: pertama, defisit anggaran yang terkendali menuju keseimbangan atau surplus, kedua, keseimbangan primer yang harus terjaga positif, dan ketiga, rasio utang luar negeri terhadap PDB harus cenderung menurun. Dalam kesempatan ini, Ketua juga mengingatkan Pemerintah bahwa dalam pembahasan RAPBN harus mencermati besarnya alokasi anggaran untuk subsidi BBM. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam kurun waktu tahun 2010-2014, alokasi belanja subsidi BBM mencapai 17,84 persen dari Belanja Pemerintah Pusat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa angka yang begitu besar tersebut berimplikasi terhadap semakin beratnya beban APBN dalam menjalankan program-program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.



Dalam fungsi legislasi, terdapat 68 RUU yang masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2014. DPR sebenarnya sudah membuat beberapa terobosan untuk meningkatkan kinerja legislasi, misalnya sejak tahun 2010 DPR memberlakukan hari legislasi. Dua hari dalam satu pekan, ditetapkan sebagai hari khusus untuk membahas RUU. Banyak kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target legislasi, antara lain belum optimalnya kinerja para anggota Dewan dan Pemerintah dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU. Ketua juga menyampaikan pelaksanaan

fungsi pengawasan, dan rencana kegiatan berkaitan dengan diplomasi parlemen.

Dalam masalah luar negeri, dua materi pokok disampaikan oleh Ketua DPR RI, yaitu: (1) keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza Palestina. Serangan brutal militer Israel telah menewaskan lebih dari 1.600 warga Palestina, dimana sebagian besar korban adalah penduduk sipil, perempuan, anak-anak dan orang tua. Lebih dari 2.500 rumah hancur, tempat peribadatan, sekolah-sekolah, bahkan sekolah yang dikelola PBB, dimana terdapat 3.000 pengungsi Palestina, (2) musibah jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH-17 pada 17 Juli 2014 di wilayah Timur Ukraina, yang menewaskan ratusan korban termasuk 12 (duabelas) korban warga negara Indonesia. DPR RI menyerukan dan mendesak badan PBB agar investigasi secara internasional terus dilakukan, mengingat penembakan pesawat sipil oleh senjata militer merupakan pelanggaran hukum internasional.

### Prolegnas 2014

Dilaporkan ada 64 RUU yang sedang dalam pembicaraan tingkat I, diantaranya adalah RUU tentang Pemilukada, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU tentang Perjanjian Internasional, RUU tentang Tenaga Kesehatan, RUU tentang Keperawatan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Beberapa RUU sedang dalam tahap harmonisasi di Baleg, antara lain RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional dan RUU tentang Hukum Disiplin Militer. Ada dua tambahan RUU yang kemudian menjadi RUU prioritas 2014, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomer 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

### Laporan BAKN

Inti dari laporan BAKN terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2013, adalah: (1) hasil telaahan BAKN menyimpulkan adanya kerugian negara yang meliputi hampir semua Kementerian dan Lembaga, (2) piutang bukan pajak sebesar Rp.3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima dan mengandung ketidakpastian karena adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS, (3) selama tahun 2013 terdapat keterlambatan penyeteroran/pemindahbukuan penerimaan PPh migas, bonus produksi dan lain-lain dari rekening migas ke rekening kas umum negara sebesar Rp. 28,86 triliun, (4) hasil penjualan gas tahun 2013 belum dibayarkan oleh wajib bayar kepada negara sebesar Rp. 2,5 triliun, (5) terdapat potensi kekurangan penerimaan negara dari pajak atas penjualan ekspor yang lebih rendah dari harga pasar kepada pihak terafiliasi dalam pengambilalihan PT Inalum oleh Pemerintah Indonesia. \*\*\*

# Pimpinan DPR Terima Bintang Mahaputera Adipradana



Presiden menyampaikan ucapan selamat setelah penganugerahan Mahaputra Adiprana kepada Pimpinan DPR RI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Ketua DPR RI Marzuki Ali dan Wakil Ketua Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Sohibul Imam serta Taufik Kurniawan. Penyerahan bintang dilakukan dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8/14).

Dalam Keputusan Presiden RI yang dibacakan Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTJTK) dijelaskan pemberian bintang kepada Pimpinan DPR serta 50 tokoh lainnya sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa diberbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara.

Kepada wartawan usai upacara Marzuki mengaku tidak menduga akan mendapat penghargaan ini.

“Kami tidak menduga sama sekali akan mendapatkan tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana. Ada beberapa teman memberikan selamat tapi justru kami sendiri belum tahu sampai kemudian Sekjen DPR menginformasikan,” ungkapnya.

Politisi FPD ini menyebut penilaian tentunya diberikan oleh Dewan GTJTK berdasarkan kriteria tersendiri dalam menilai kinerjanya. Ia menambahkan penghargaan yang diberikan negara ini menambah beban untuk bekerja lebih baik lagi bagi kepentingan masyarakat pada masa yang akan datang.

Tokoh lain yang mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dalam kesempatan itu diantaranya adalah istri Wakil Presiden Herawati Boediono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Jaksa Agung Basrieff Arief, mantan Menteri Agama Maftuh

Basyuni dan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo.

Pemberian bintang dan tanda jasa ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Peringatan Kemerdekaan RI yang ke-69. Disamping Bintang Mahaputera Adipradana diserahkan pula Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Nararya, Bintang Jasa Utama dan Bintang Jasa Nararya.

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyampaikan doa penutup menyebut apa yang telah dilakukan putera puteri terbaik bangsa ini sebagai darma bakti dan amal ibadah. “Penghargaan ini adalah pengakuan tulus atas darma bakti. Terimalah Ya Allah bukan hanya sebagai darma bakti bagi bangsa tetapi juga sebagai amal ibadah yang tulus.” Amin Ya Rabbal Alamin. (iky)/foto:andri/parle/iw.



## 2.275 Tokoh-Masyarakat Teladan Hadiri Sidang Bersama DPR-DPD RI

2.275 Tokoh/Masyarakat Teladan turut menghadiri Sidang Bersama DPR/DPD RI dalam acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke 69 Kemerdekaan RI Tahun 2014 di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8)

Dalam sidang bersama tersebut, Ketua DPR RI, Marzuki Alie dalam pidatonya memperkenalkan sebagian tokoh/masyarakat teladan dari seluruh Indonesia yang berjumlah 2.275 tersebut yang berada di Gedung DPR.

“Karena keterbatasan tempat, para teladan tersebut, diwakili oleh 60 orang teladan yang berada di balkon utama ruangan ini, sedangkan teladan lainnya berada di lobi Gedung Nusantara III, IV, dan V,” papar Marzuki.

Kemudian ia menyebutkan 10 klasifikasi teladan dan berprestasi mulai dari Kementerian Pendidikan (seperti Guru Teladan, Kepala Sekolah Teladan), Kementerian Pertanian (Penyuluh Pertanian), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pembina Transmigrasi), Badan Pusat Statistik (Koordinator Statistik Kecamatan), Kementerian Kesehatan (Tenaga Medis, Tenaga Perawat), Kementerian Dalam Negeri (Kepala Desa, Lurah, Camat), Kementerian Kehutanan (Penyuluh Kehutanan), Kementerian Agama (Peserta Keluarga Sakinah, KUA Percontohan),



Suasana Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan dari RRI (Reporter RRI Daerah Perbatasan).

Setelah itu, Marzuki meminta seluruh perwakilan teladan yang berada di balkon untuk berdiri. “Kita berikan aplaus atas kehadiran mereka,” katanya.

Seluruh hadirin yang menghadiri sidang bersama tersebut memberikan tepuk tangan untuk para teladan /berprestasi tersebut.

Kehadiran masyarakat teladan di tengah-tengah kita, dijelaskan Marzuki, merupakan kebanggaan dan penghargaan atas dedikasi dan prestasi masing-masing dalam membangun Indonesia.

“Kita berharap, prestasi-prestasi ini dapat dipertahankan dan dikembangkan. Sehingga kedepan akan makin memperoleh prestasi yang lebih baik lagi demi kemajuan bangsa Indonesia,” tegasnya. (sc) foto: tim/parle/hr.

## Dewan Apresiasi Pemerintahan Presiden SBY

Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014 yang telah berjalan lancar, damai, dan dengan kondisi keamanan yang terjaga

“Apresiasi besar kita sampaikan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu menciptakan suasana kondusif, aman dan damai,” kata Marzuki dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR/DPD RI dalam rangka HUT ke-69 Kemerdekaan RI Tahun 2014 di Gedung

Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

Kemampuan pemerintah dalam menciptakan suasana demikian, kata Marzuki, bukan suatu hal yang instan. Namun, sangat berkait erat dengan keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan bidang ekonomi yang telah diupayakan pemerintah selama ini.

“Prestasi pemerintah selama 10 tahun terakhir, sangat mendukung proses suksesi kepemimpinan yang baik dan wajar,” kata politisi Partai Demokrat ini.



Pimpinan DPR dan DPD

Namun demikian, ujar Marzuki, Dewan mendorong pemerintah untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga sampai waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presi-

den terpilih.

“Kita berharap, lahirnya para pemimpin-pemimpin baru, akan menghadirkan kehidupan damai, mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan mampu membawa bangsa ini mencapai cita-cita kemerdekaan sebagaimana amanah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” paparnya.

Presiden dan Wakil Presiden baru, menurut Marzuki, harus mampu bersinergi dengan lembaga negara lainnya, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing agar mekanisme *check and balances* dapat terimplementasikan dengan baik, demi memperkokoh bangunan demokrasi yang lebih berbudaya dan berkeadaban.

Marzuki juga mengapresiasi kinerja pemerintah SBY yang telah berhasil membangun kebersamaan dengan lembaga-lembaga lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama, saling menghargai dan menghormati serta tidak ada intervensi yang telah memberikan keteladanan bagi kehidupan demokrasi yang dama dan berbudaya. (sc) foto: tim/parle/hr.

## Tim Kunker Komisi V DPR Tinjau Perumahan Rakyat di Banjarmasin

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR tinjau dua perumahan rakyat di Sungai Andai Banjarmasin, yakni Perumahan Purnama Permai III dan Kompleks Herlina Perkasa.

Pada kunjungan tersebut, tim meninjau bantuan pembuatan jalan beton dari Kementerian Perumahan Rakyat di dua lokasi itu. “Pada intinya kita ingin melihat langsung penggunaan APBN sebesar Rp. 1 Miliar lebih ini,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus baru-baru ini.

Menurutnya, proses selanjutnya perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel dengan melakukan pengaspalan. Karena memang lokasi tersebut berada di lahan gambut. Kalau tidak diaspal, jalan beton yang sudah ada akan rusak apabila dilalu berbagai jenis kendaraan yang melewati wilayah itu.

Dia mengatakan, dengan adanya bantuan dari pusat meskipun dana yang tak terlalu besar, semoga bantuan tersebut dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. (si) foto: sugeng/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus saat memimpin kunker ke Banjarmasin

# DPR Dukung Pemerintah Larang Paham ISIS di Indonesia

Persatuan dan kesatuan yang menjadi kekuatan bangsa dalam bernegara, harus benar-benar dikelola dengan penuh kewaspadaan. Persatuan Indonesia perlu dijaga agar tidak ada gerakan atau organisasi manapun, termasuk dari luar negeri yang akhir-akhir ini kita kenal sebagai organisasi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Demikian ditegaskan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan pidato di depan Sidang Paripurna Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8). Dalam rangkaian acara menyambut HUT RI ke-69, Ketua DPR lebih lanjut mengatakan, paham yang dianut ISIS bersifat radikal dan berpotensi menimbulkan kerawanan yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. “Oleh karena itu, Dewan mendukung tindakan tegas Pemerintah untuk melarang perkembangan paham ini di



Ketua DPR RI Marzuki Alie

bumi Indonesia,” tandas Marzuki.

Menurut Pimpinan Dewan dari FPD ini, sebagaimana kita pahami, Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ruang demokrasi yang

telah dibuka lebar melalui amandemen UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya, harus makin berkualitas.

Oleh karena itu pula lanjutnya, peradaban demokrasi yang terus akan kita bangun, harus bersendikan pada hakekat kemanusiaan dan keadilan sosial, menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Memberikan penghargaan kepada keberagaman, pluralisme, dan memberi penguatan bagi *nation and character building*.

Satu hal yang sangat penting adalah, tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah kekuatan yang senantiasa kita dengarkan, yang telah membuktikan bahwa betapa pun beratnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini, kita tetap mampu untuk mengatasinya. (mp,spy) foto: tim/parle/hr.

# Putusan MK Terhadap Presiden dan Wapres Terpilih Harus Dihormati

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, kita masih menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan gugatan Pilpres 2014. Dia berharap, kematangan di dalam berdemokrasi akan memberikan jalan bagi tercapainya cita-cita dan tujuan kita dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

“Putusan MK mengenai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus dihormati seluruh rakyat Indonesia,” kata Marzuki saat menyampaikan Pidato pada Sidang Paripurna Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI ke-69 di Gedung DPR Jumat (15/8).

Dalam Sidang Paripurna yang juga dihadiri Presiden SBY untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan RI itu, Ketua DPR lebih lanjut mengatakan,



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Bersama DPR dan DPD

Pemilu Legislatif telah menghasilkan anggota parlemen terpilih, yaitu anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang akan bertindak selaku wakil-wakil rakyat untuk kurun waktu lima tahun kedepan, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang sangat memprihatinkan.

“Tentunya, harus tetap menjadi pembelajaran kita semua agar Pemilu legislatif yang akan datang semakin berkualitas,” ungkap Marzuki. Namun demikian, anggota DPR-RI dan DPD-RI hasil Pemilu tetap akan diambil sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 2014.

Pada kesempatan ini Ketua DPR menyampaikan rasa syukur bahwa Pemilu Presiden/Wakil Presiden telah berjalan lancar, damai, dan alhamdulillah dengan kondisi keamanan yang tetap terjaga. “Apresiasi besar kita sampaikan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu menciptakan suasana kondusif. Namun demikian, Dewan mendorong Pemerintah untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga sampai waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” harap Ketua Dewan.

Untuk itu Marzuki berharap, lahirnya para pemimpin-pemimpin baru, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif,

akan menghadirkan kehidupan yang damai, mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mampu membawa bangsa ini mencapai cita-cita kemerdekaan sebagaimana amanah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden baru, kata Marzuki Alie, harus mampu bersinergi dengan lembaga negara lainnya, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing agar mekanisme *check and balances* dapat terimplementasikan dengan baik, demi memperkokoh bangunan demokrasi yang lebih berbudaya dan berkeadaban. (mp,spy) foto: tim/parle/hr.

## Nasionalisme Anggota Dewan Perlu Disegarkan



Anggota Komisi VIII DPR Syofwatillah Mohzaib

Anggota Komisi VIII DPR Syofwatillah Mohzaib mengatakan rasa nasionalisme setiap warga bangsa perlu terus disegarkan termasuk anggota

dewan yang baru saja terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014. Ia menyambut baik kesempatan untuk mengikuti pembekalan Harmonisasi Wawasan Kebangsaan di Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional).

“Nasionalisme itu perlu disegarkan termasuk kita anggota dewan. Jadi pembekalan ini penyegaran bagi kita, memantapkan lagi, menguatkan lagi rasa nasionalisme karena hal itu diperlukan dalam mengambil satu kebijakan di parlemen,” katanya usai mengikuti acara pembukaan pem-

bekalan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (12/8/14).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini

menambahkan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan oleh Lemhanas bekerja sama dengan Setjen DPR patut mendapat apresiasi. Ia juga menyampaikan komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian program sampai tuntas, lima hari penuh.

Bicara pada kesempatan yang sama Novita Wijayanti anggota DPR RI terpilih dalam Pileg lalu menyebut pembekalan seperti ini akan menambah keyakinannya dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.



Anggota DPR Terpilih Novita Wijayanti

“Iya dengan pembekalan ini pada saat dilantik nanti, kita akan lebih siap lagi menghadapi tantangan yang ada di negeri ini,” papar Novi yang segera menjadi anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR.

Bagi anggota dewan yang baru saja terpilih dalam pemilu lalu - disamping Wawasan Kebangsaan, mereka juga akan mendapatkan materi tambahan tentang tugas-tugas kedewanan seperti proses pembahasan undang-undang dan penetapan anggaran. Pem-

bicara dalam sesi ini disiapkan oleh Setjen DPR RI. Pembekalan bagi anggota DPR periode 2014-2019 ini akan berlangsung dalam empat gelombang sampai pertengahan September nanti. (iky) foto: andri/parle/hr.

## Gladi Bersih Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPR

DPR RI bersama DPD RI menggelar gladi bersih (Kamis 14/8) sebelum pelaksanaan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke 69 Kemerdekaan RI dan Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2015 disertai Nota Keuangan yang akan berlangsung di ruang rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam acara tersebut dilakukan pula simulasi pengamanan. Menurut Komandan Komplek Pasukan Pengawal Presiden (Danplek Paspamres), Letkol Urip P tidak ada yang berbeda dari pengamanan Pidato Kenegaraan tahun ini. Semua sesuai standar pengamanan VVIP yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun.

“Untuk berapa personil Paspamres yang diturunkan dalam pengamanan ini tidak dapat kami sebutkan karena menyangkut rahasia pengamanan VVIP. Namun yang pasti pengamanan yang kami lakukan ini seyogyanya sudah



Danplek Paspamres Letkol Inf. Urip P

dilakukan sejak jauh hari meliputi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Dimana pada ring satu merupakan tanggung jawab Paspamres, ring dua dan tiga merupakan tanggung jawab wilayah TNI dan Polri,” jelas Urip.

Acara kenegaraan ini akan dihadiri oleh anggota DPR RI dan DPD RI, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur, pejabat Negara, Dubes-dubes dari Negara tetangga serta teladan dari berbagai bidang kehidupan yang jumlahnya mencapai 2.518 orang.

Acara tersebut dimeriahkan oleh Kelompok Musik Gita Bahana Nusantara yang akan mengiringi hadirin dan tamu undangan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di sore harinya Korsik (Korps Musik) Mabes Polri juga mengiringi hadirin dan tamu undangan yang menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. (Ayu) foto: odjie/parle/hr.

## DPR Berduka Atas Meninggalnya Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-69, keluarga besar DPR RI berduka. Putra terbaik bangsa yang menjabat sebagai Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama, Rabu (13/8) menghembuskan nafas terakhir di RS Surya Husada, Denpasar- Bali akibat sebuah musibah yang terjadi di kediamannya di Jalan Pulau Hadi, Teuku Umar Kota Denpasar Bali.

Almarhum menjabat sebagai Ketua Komisi V DPR RI menggantikan rekan separtainya Yasti Soepredjo Mokoagow. Selama masa jabatannya, almarhum terkenal sebagai sosok yang baik dan mudah bergaul. Laurens juga sosok yang terbuka, cerdas dan akomodatif kepada seluruh ang-

gota di komisinya. Bahkan sehari sebelum kepergiannya tersebut, Laurens sempat mengikuti kunjungan kerja terakhir ke Maluku pada 11-13 Agustus 2014 kemarin.

“Tak ada yang berbeda dari sikap Pak Laurens selama kunjungan kerjanya terakhir ke Maluku senin (11/8) kemarin. Saya duduk berdampingan dengan beliau satu pesawat, karena itu saya tidak mengira beliau akan pergi secepat itu. Tapi begitulah kehendak Tuhan,” kata Michael Watimena terhadap sosok Laurens.

Sementara itu bagi para wartawan yang bertugas di gedung Parlemen, Senayan, Ketua DPC NTT Partai Amanat



Laurens Bahang Dama dalam suatu kesempatan Kunjungan Kerja

Nasional (PAN) itu termasuk Pimpinan Komisi yang ramah dan sangat terbuka dengan wartawan. Ia selalu siap kapan saja wartawan membutuhkan informasi dan pendapatnya terhadap suatu hal. Tak heran jika selama ini sosoknya sangat dekat dengan wartawan.

Suatu hari tanpa sengaja seorang staff pemberitaan DPR pernah bertemu almarhum di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Tanpa sungkan-sungkan Laurens yang merasa mengenali staff tersebut langsung menyapanya terlebih dahulu.

“Jujur ketika itu saya tidak melihat, tapi beliau melihat dan menyapa saya terlebih dahulu, padahal kan beliau Ketua Komisi. Saat itu juga saya malu dan menjadi bertambah keaguman saya terhadapnya,” ungkap Setiowati.

Selama karirnya, pria kelahiran Dewuk, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, 13 Februari 1964 ini pernah menjabat sebagai Ketua Forum Pariwisata NTT, Pembina Yayasan Nusa Wisata, serta Ketua DPC NTT Partai berlambang Matahari terbit itu. Sontak kepergian Laurens secara tiba-tiba ini membuat terkejut semua pihak. Tidak hanya itu, duka mendalam juga dirasakan oleh seluruh keluarga besar DPR RI. Takdir berkata lain, Pimpinan Komisi V DPR RI yang juga menjadi salah satu putra terbaik bangsa itu sudah terlebih dahulu menghadap Illahi.

Akhirnya, pimpinan, anggota dan seluruh staff Setjen DPR RI mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Laurens Bahang Dama. Semoga almarhum mendapat tempat yang paling indah disisiNya, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya, Aamiin YRA. (Ayu)

## Pidato Kenegaraan HUT RI ke-69 Inspiratif

Terkait Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-69, Anggota DPR Abdul Hakam Naja dari Fraksi PKS mengatakan, Pidato tersebut cukup inspiratif serta menggambarkan keberhasilan pemerintah Indonesia saat ini.

“Pidato SBY sangat inspiratif serta penyampaian cukup bagus dan jernih selain itu apabila ada keberhasilan harus kita akui itu sebuah keberhasi-



Anggota DPR Abdul Hakam Naja



lan, serta tidak boleh berpuas diri,” ujarnya kepada parlementaria, di Gedung Nusantara, Jumát, (15/8).

Menurutnya, kita perlu mengapresiasi dan jangan bangga diri. “Pidato cukup baik, selain itu terdapat catatan penting bagi teman-teman yang terpilih di DPR RI ataupun DPD dan Presiden mendatang,” tandasnya.

Dia menambahkan, tantangan utamanya yaitu tingginya kesenjangan. Hal tersebut juga diakui oleh Presiden SBY bahwa masih ada persoalan mengenai keadilan. “Kesenjangan yang tinggi semakin meningkat akibat dampak dari kemajuan ekonomi artinya kita tidak boleh meninggalkan siapapun anak bangsa justru lapisan terbawah itu harus diperhatikan,” paparnya. (si) foto: tim/parle/hr.



# Anugerah Bintang yang Mengharukan

Bagaimana rasanya mendapat anugerah Bintang Mahaputra dari negara dan diserahkan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan? Lima Pimpinan DPR RI menjadi bagian dari 55 tokoh yang tahun ini merasakan sendiri pengalaman mendapat bintang itu.

“Saya merasa terharu perjalanan panjang dan pengabdian kami dinilai negara patut mendapat penghargaan Mahaputra Adipradana. Ini adalah anugerah dari Gusti Allah, anugerah dari negara, anugerah dari rakyat dan menjadi beban dan amanah bagi saya untuk terus bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara,” kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso usai upacara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8/14).

Penyematan bintang itu dilakukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disaksikan oleh sejumlah pejabat negara. Upacara kenegaraan ini berlangsung khidmat dan turut dihadiri oleh sejumlah anggota keluarga dari para tokoh.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman yang didampingi oleh istri mengatakan apresiasi dari negara ini mempunyai dua sisi. “Secara manusiawi tentu saya senang mendapat penghargaan karena ini berarti apresiasi, disisi lain saya perlu introspeksi kemudian bagaimana saya bisa memberi kontribusi yang lebih baik lagi sehingga tanda kehormatan ini tidak semata-mata sebuah simbol,” tuturnya.

Usai korps musik membawakan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda upacara resmi penganugerahan selesai, seluruh anggota keluarga yang berkesempatan hadir segera datang menyalami. Ibunda Priyo Budi Santoso terlihat memeluk putranya dengan haru. Suasana yang hampir sama juga terlihat pada keluarga para tokoh lainnya.

Tahun ini, Presiden SBY setelah menerima masukan da-



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat diwawancara wartawan

ri Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga menyampaikan Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Nararya, Bintang Jasa Utama dan Bintang Jasa Nararya.

Tokoh yang memperoleh Bintang Jasa Nararya diantaranya Kolonel Inf (Purn) Surachman atlet peraih Juara I kejuaraan maraton di California dan Selangor Malaysia. Ia juga pernah menjuarai jalan cepat Master Asia di Taipei, Taiwan. Lainnya Pendeta Lipiyus Biniluk tokoh yang aktif memperjuangkan kerukunan umat beragama di Papua. (iky) foto: andry/parle/hr.



## PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI BESERTA KELUARGA BESAR SETJEN DPR RI TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA



### DRS. LAURENS BAHANG DAMA

Ketua Komisi V DPR RI, Fraksi Partai Amanat Nasional

Lahir: Dawuk 13 Februari 1964, wafat: Denpasar, 13 Agustus 2014

### Galeri Foto rangkaian acara menyambut HUT RI ke 69 di Gedung DPR RI





# Kondisi Makro Ekonomi Relatif Stabil

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kondisi makro ekonomi Indonesia relatif lebih stabil. “Kita dapat menjaga stabilitas dan kondisi makro ekonomi yang relatif baik, walaupun walaupun bangsa kita terus diterpa cobaan, apakah itu dalam bentuk bencana alam maupun krisis moneter global utamanya pada tahun 2008,” ujarnya saat menyampaikan Pidato terkait HUT RI ke-69 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara, Jumát, (15/8).

Menurutnya, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009-2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9 persen.

“Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa dan Jepang pada kurun waktu yang sama. Di semester pertama tahun 2014 ini, ekonomi kita memang mengalami perlambatan menjadi sekitar 5,2 persen,” ujarnya.

Dia menambahkan, diantara negara-negara G-20, Indonesia tetap menempati posisi pertumbuhan tertinggi setelah Tiongkok. “Kemampuan kita untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi sangat penting, mengingat dewasa ini cukup banyak negara-negara emerging ekonomi lainnya yang pertumbuhan ekonominya menurun, bahkan sebagian menurun cukup tajam,” tandasnya.

Dia menambahkan, utang negara juga kini telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. “Kita tahu Utang adalah faktor penting karena berkaitan dengan rasa percaya diri dan harga diri suatu bangsa. Utang juga sering dianggap sebagai ancaman dan stigma yang buruk oleh rakyat Indonesia,” paparnya.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Di puncak krisis moneter tahun 1998, lanjutnya, rasio utang kita terhadap PDB adalah 85 persen, yang artinya utang kita hampir sama besarnya dengan penghasilan bangsa kita. Dengan susah payah, akhirnya kita berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB kita menjadi sekitar 23 persen.

“Ini bukanlah capaian yang boleh diabaikan. Mari kita bandingkan dengan rasio utang terhadap PDB negara-negara maju yang terus tinggi, Jepang 227,2 persen, Amerika Serikat 101,5 persen, atau Jerman 78,4 persen. Dalam hal ini, rasio utang terhadap PDB Indonesia adalah yang terendah diantara negara-negara G-20,” tambahnya. (si) foto: tim/parle/hr.

## Komisi V Dukung Bandara Pattimura Sebagai Bandara Internasional

Tim Kunker Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena beserta 21 orang anggotanya mendukung penuh keinginan PT Angkasa Pura I yang akan meningkatkan status Bandara Pattimura sebagai Bandara Internasional. Masalah tersebut akan dibawa dan dibahas dalam raker dengan Kemenhub dan pihak terkait dalam masa persidangan mendatang.

Hal itu mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di penghujung reses masa persidangan IV tahun sidang 2013-2014, dipimpin wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena (FPD) menggelar pertemuan dengan PT Angkasa Pura I di ruang rapat VIP,



Tim Kunker Komisi V DPR saat pertemuan dengan PT Angkasa Pura I

Kompleks Bandara Pattimura Ambon Maluku, Senin (11/8) lalu.

“Kami datang ke sini untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pembangunan maupun hasil pekerjaannya yang terkait Bandara Pattimura, benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi pelayanan di daerah-daerah terdepan Indonesia seperti di wilayah Maluku Tenggara agar keutuhan dan kedaulatan NKRI terjaga” ungkap Michael.

Menanggapi hal tersebut General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura Halendra Y.W memaparkan bahwa kebutuhan pelayanan penerbangan ke daerah-daerah tepi Maluku sudah terpenuhi dengan adanya tiga flight tambahan dari Maskapai Garuda Indonesia yaitu ke Ternate, Sorowai dan Tual serta satu penerbangan oleh

Maskapai Sriwijaya ke Ternate.

Lebih lanjut Halendra mengungkapkan bahwa sebenarnya masalah utama dari Bandara Pattimura adalah statusnya sebagai bandara internasional tetapi tanpa ada penerbangan dari dan ke luar negeri.

“Jadi kami memohon dukungan kepada DPR agar kami bisa membuka rute internasional untuk beberapa kota di luar negeri saja dan jadwal penerbangannya mungkin tidak perlu setiap hari,” katanya.

Anggota Komisi V Rendhy Lamadjido (F PDI Perjuangan) mempertanyakan kesiapan bandara dan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan penerbangan internasional ini.

“Dengan keinginan tersebut apakah

Angkasa Pura di sini sudah siap, juga pemerintah daerahnya. Jangan seperti yang lalu, ternyata tidak sepenuhnya didukung, yang terjadi adalah rute internasional itu hanya bertahan beberapa saat,” ujar Rendhy.

Halendra menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai koordinasi baik dengan Pemprov, berbagai mitra sampai dengan pihak kota yang direkomendasikannya untuk membuka rute, yaitu Manila Filipina dan Darwin Australia.

“Kami sudah melakukan usaha dengan berbagai mitra, mencoba penjajakan dengan pihak turisme di Bali dan bahkan kami sendiri sudah bertemu Walikota Darwin yang menyambut positif rencana ini, tinggal perijinan dari pemerintah” jelas Halendra. (ray)

foto: rizka/parle/hr.

## Seapac Bangun Etika dan Integritas Perangi Korupsi



Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung

Presiden Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), Marzuki Alie dan Ketua Gugus Tugas Nasional Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia, Pramono Anung Wibowo, mengundang parlemen di kawasan Asia Tenggara, terlebih yang memiliki Gugus Tugas GOPAC di Parlemennya untuk hadir di SEAPAC Board Meeting yang akan membicarakan program-program

penguatan gerakan anti korupsi di parlemen kawasan Asia Tenggara.

Pada kesempatan ini juga akan diadakan Workshop dengan tema “Stronger Ethics and Integrity: Path for Parliament to Combat Corruption” yang akan diselenggarakan pada tanggal 28-29 Agustus 2014 di Jakarta.

Kode etik yang tegas dapat membangun suasana etika baik dan integritas yang kuat di Parlemen maupun di Pemerintah. Kode etik tersebut diupayakan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas diantara pejabat publik. Sesuai Artikel *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* No. 8 telah menggarisbawahi perlu untuk memiliki sebuah kode etik bagi pejabat publik, maka SEAPAC berkomitmen untuk menciptakan kode etik yang menawarkan standar etis dan titik acuan yang jelas bagi warga dan pemerintah untuk digunakan dalam menilai perilaku dari pejabat publik.

Akan hadir pada SEAPAC *Board Meeting and Workshop*, antara lain Anggota GOPAC Executive Board, Osei Kyei-Mensah Bonsu; Member of GOPAC *Parliamentary Ethics and Conduct Global Task Force (GTF-PEC)*, Brig. Gen. SK. Abu Bakr; Parlemen Anggota SEAPAC, Timor Leste, Malaysia dan Brunei Darussalam; dan berbagai organisasi anti-korupsi seperti *United Nation on Drugs & Crime (UNODC)*, *Transparency International and National Democratic Institute (TI-NDI)* dan Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK). Adapun Sekretariat SEAPAC masih menunggu konfirmasi kehadiran dari Parlemen Anggota SEAPAC lainnya, yakni: Laos, Kamboja, Filipina dan Myanmar.

Diselenggarakannya Workshop tersebut akan berguna dalam upaya penilaian dan pemetaan dari setiap Anggota SEAPAC untuk pengaturan sebuah ukuran perilaku dalam menjalankan perannya sebagai anggota parlemen serta menyediakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dalam pembentukan etika dan integritas dari setiap anggota parlemen SEAPAC dalam upaya memerangi korupsi di kawasan Asia Tenggara.

Presiden SEAPAC mengharapkan kehadiran seluruh Parlemen Sahabat Anggota SEAPAC di *Board Meeting and Workshop* sebagai upaya memperkuat peran pengawasan dan legislasi Parlemen serta mempromosikan transparansi, tata pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi di kawasan Asia Tenggara. (BKSAP,mp) foto: dok/parle/hr.

## Wakil Ketua DPR Pramono Anung Terima Delegasi Kongres AS

Anggota Kongres Amerika Serikat Rodney Frelinghuysen, Kay Granger, Ken Calvert, dan Jim Moran didampingi sejumlah stafnya menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Surahman Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).

Seusai pertemuan Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada pers menjelaskan, dalam acara tersebut dibahas masalah kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika, karena Indonesia sempat diembargo oleh AS dan menghadapi kendala dengan pembelian pesawat tempur F-16. Karena itu, kata Pramono, Indonesia meminta masalah ini diperbaiki.

Delegasi Kongres AS juga berharap Indonesia dengan demokrasi yang tumbuh dengan baik bisa menjadi partner kompatible (pasangan serasi) karena Indonesia merupakan negara demokrasi nomor tiga sedangkan AS sebagai negara demokrasi nomor dua.

“Dengan kekuatan ekonomi yang ada, harapannya adalah Indonesia ke depan bisa memainkan peran yang signifikan di dunia internasional,” terang Pimpinan DPR dari PDI Perjuangan ini.

Ditanya apakah anggota Kongres AS ini juga memantau Pilpres di Indonesia, Pramono tidak menampik. “Mereka jelas memantau, tetapi menyatakan tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan mereka berharap apapun yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan terbaik untuk bangsa Indonesia,” ungkapnya.



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung

Mereka juga berharap, dengan pemerintah baru nanti, kerja sama yang sudah berjalan baik dengan AS selama ini terutama bidang pendidikan, perdagangan, pertahanan, dan juga kebudayaan, bisa lebih ditingkatkan. Hubungan Indonesia- AS, kata Pramono, relatif unik karena negara jitu jaraknya jauh, tetapi praktis mempunyai pengaruh yang luar biasa. Mereka juga berharap, Indonesia bisa berperan yang lebih besar di dunia internasional terutama di bidang perdagangan. (mp)/foto:odjie/parle/iw.

# Delegasi Kongres AS Tak Bahas Pilpres

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, kehadiran anggota Kongres Amerika Serikat yang berkunjung ke DPR tidak membahas masalah pilpres dan penyusunan Kabinet. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan kita dan sama sekali tidak ada intervensi. “Sama sekali tidak ada, mereka sangat menghormati apa yang menjadi kewenangan kita dan mereka melihat bahwa pileg dan pilpres yang cukup baik itu akan membawa Indonesia lebih baik. Apalagi anggota Kongres yang datang terdiri dari dua kubu, baik dari partai Republik maupun partai Demokrat,” tegas Pram, panggilan akrab Pimpinan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ditemui sejumlah wartawan usai pertemuan dengan keempat anggota Kongres AS terdiri Rodney Frelinghuysen, Kay Granger, Ken Calvert dan Jim Moran didampingi sejumlah stafnya, Senin (11/8) di ruang pertemuan Pimpinan DPR Lantai III Gedung Nusantara III, Pramono mengakui memang ada kunjungan anggota Kongres AS yang cukup besar saat ini ke Indonesia. Di saat bersamaan mantan kandidat Presiden AS Mc Cain diterima Ketua MPR Sidarto Dhanusubroto. Dijadwalkan mereka juga akan mengadakan pertemuan dengan Presiden SBY.

Apalagi kata Pramono, Mc Cain adalah tokoh senior Republikan yang dalam pemilihan Presiden lalu sempat



Wakil Ketua DPR Pramono Anung berdialog dengan anggota Kongres AS

dikalahkan oleh Obama. Dijelaskan Pramono, Delegasi kongres AS yang datang ke Indonesia adalah terdiri dari Partai Republik dan Demokrat sehingga disebut rombongan terbesar yang ada selama ini.

“Ini adalah rombongan terbesar yang saya ketahui sejak menjadi anggota DPR dan mereka sama sekali tidak ada urusan dengan masalah pilpres. Tapi mereka mengharapkan, siapapun Presiden yang akan terpilih nanti bisa

bekerja sama lebih baik, bukan hanya dengan AS juga mempunyai peran cukup kuat di dunia internasional,” ia menjelaskan.

Di kawasan Asia, mereka juga berharap peran Indonesia bisa lebih meningkat lagi karena sebentar lagi akan menghadapi *Asean Community* dan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di Asean, diharapkan bisa membalance perimbangan kekuatan ekonomi dunia. (mp)/foto:odjie/parle/iw.

## Sebelum Dilantik Anggota DPR Bahas Problem Bangsa di Lemhanas

Setelah menyelesaikan pembekalan bagi Anggota DPR incumbent, Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) segera memulai pembekalan gelombang kedua, khusus bagi anggota dewan yang baru saja terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014. Dalam kegiatan ini diharapkan anggota legislatif yang telah mendapat mandat dari rakyat ini akan semakin paham permasalahan bangsa.

“Kita tahu DPR itu memiliki kewenangan besar jadi saya

kira bagus sekali sebelum mereka bertugas kita laksanakan semacam diskusi panjang di Lemhanas membicarakan problem yang dihadapi bangsa kita,” kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso kepada wartawan usai membuka secara resmi pembekalan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (12/8/14).

Ia menambahkan kegiatan pembekalan merupakan kerja sama DPR RI dengan Lemhanas. Wakil rakyat dari 77 daerah



Anggota DPR RI menerima pembekalan di Lemhanas

pemilihan di seluruh Indonesia ini akan berdiskusi tentang persoalan kebangsaan, patriotisme, dan nasionalisme. Tidak kalah penting persoalan ancaman, tantangan, dan peluang yang dihadapi bangsa.

“Saya titipkan kekusaran saya, Bangsa Indonesia sedang ditimpa persoalan yang besar, gesekan masyarakat yang demikian besar, masyarakat gampang marah, imbas pertarungan politik dimana-mana. Ini ongkos sosialnya mahal. Solusinya bisa dicapai kalau pimpinan nasional dan lokal berkomitmen menyuburkan nilai luhur yang bangsa, tenggang rasa, tepo seliro,” paparnya.

Sementara itu Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji menjelaskan ada perbedaan dalam pembekalan bagi anggota DPR *incumbent* dengan yang baru pertama terpilih. Anggota *incumbent* yang sudah berpengalaman sebagai instruktur dalam sosialisasi Empat Pilar mengikuti program yang berlangsung selama lima hari sedangkan anggota baru 15 hari.

“Kalau anggota yang *incumbent* tentu sudah mengetahui perannya jadi hanya mengikuti harmonisasi saja. Kita berharap anggota DPR yang baru dan lama punya kesamaan persepsi dalam membaca tantangan regional dan global yang bisa mengganggu nilai kebangsaan itu sendiri,” pungkask dia. (iky)/foto:andri/parle/iw.

## Priyo Ingatkan Nilai Kebangsaan Semakin Redup

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta segenap pihak terutama Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) melakukan kajian tentang dampak globalisasi yang mengancam nilai-nilai luhur bangsa. Apabila dibiarkan maka kondisi ini dapat menggerus nasionalisme warga bangsa.

“Sehebat apapun kita pertahankan globalisasi tidak bisa dihindari, yang bermuara pada homogenitas kultur dimana identitas nasional dipertaruhkan. Globalisasi juga menguatkan ikatan solidaritas atas nama agama, etnis, ideologi sehingga nilai-nilai kebangsaan kalah dan redup,” katanya saat menutup Pembekalan Anggota DPR 2014-2019 Gelombang I di Gedung Lemhanas, Jakarta, Jumat, (11/8/14).

Ia mencatat pada saat nilai kebangsaan, patriotisme, dan nasionalisme meredup publik kemudian menyaksikan anggota masyarakat yang mudah marah. Nasionalisme menurutnya penting karena pasti berpaham pluralis, demokratis, dan egaliter. Perlu menghadirkan kembali tepo seliro yang pernah diagungkan sebagai



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

karya luhur bangsa Indonesia.

“Saya meyakini kalau Lemhanas mengkaji hal seperti ini, jika hal yang kita gundahkan ini menjadi perhatian utama maka lembaga negara ini akan sangat dirindukan masyarakat,” paparnya.

Sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah politik dan keamanan ia berharap masalah ini juga menjadi

perhatian anggota dewan yang akan segera bertugas lima tahun ke depan.

Pembekalan yang diberi nama Harmonisasi Wawasan Kebangsaan ini diikuti 89 anggota DPR *incumbent*. Sementara anggota DPR yang baru terpilih dijadwalkan mengikuti pembekalan dalam tiga gelombang berbeda. Rangkaian kegiatan ini akan berakhir pada tanggal 12 September nanti. (iky)/foto:andri/parle/iw.

## Layanan Kesehatan Jauh Api Dari Panggang

Kritik tajam atas pidato Presiden SBY disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati, terutama menyangkut pelaksanaan BPJS Kesehatan. Faktanya, pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat di Tanah Air, masih jauh dari kenyataan yang disampaikan Presiden.

“Presiden menyatakan keoptimisannya untuk bisa membiayai layanan kesehatan seluruh warga negara. Hanya saja menurut saya, statemen Presiden itu masih jauh api dari panggang. Bahkan, beliau sempat mengutip statemen penerima nobel bidang ekonomi bahwa kemajuan suatu bangsa terkait erat dengan perkembangan kesehatan dan pendidikan. Namun, sampai kabinet besutan SBY ini akan berakhir, anggaran kesehatan tak pernah sesuai dengan amanah UU.”

Pernyataan Okky tersebut disampaikan usai mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden di DPR, Jumat (15/8). Seperti diketahui, UU No.36/2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 5%



Anggota Komisi IX Okky Asokawati

dari APBN. Menurut politisi PPP itu, keberpihakan pemerintah terhadap

sektor kesehatan masih minim.

Presiden sendiri dalam pidatonya mengatakan, Indonesia sudah memiliki sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Hingga awal bulan Agustus 2014, BPJS telah memberikan jaminan kesehatan untuk lebih dari 126,4 juta penduduk. Dan pada 2019 program jaminan kesehatan ini akan mencakup seluruh penduduk di Tanah Air.

Menurut Okky, bila dibandingkan dengan negara yang baru merdeka seperti Timor Leste saja, anggaran kesehatan negara kita masih rendah. Timor Leste telah menganggarkan 7% dari APBN-nya. Sementara kita, 5% saja belum terpenuhi.

“Mahatir Muhammad pernah menertawakan Presiden Soeharto terkait dengan anggaran kesehatan ini, yang saat itu dipandang Mahatir sangat kecil. Dan rupanya hingga akhir masa jabatan Presiden SBY pun keberpihakan terhadap kesehatan masih jauh dari harapan,” tutupnya, mengakhiri wawancara. (mh) foto: hr/parle

## Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Anggota DPR Mohammad Hatta mengatakan, pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-69 yang disampaikan oleh SBY sudah cukup baik serta menggambarkan perkembangan ekonomi di Indonesia. “Saya kira langkah baik yang disampaikan oleh Presiden SBY, baik kita akui atau tidak negara kita merupakan negara pertumbuhan ekonomi terbesar dunia itu telah disampaikan cukup bagus pada pidatonya,” ujar anggota dari PKB ini.

Menurut Hatta, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih *on the track*. artinya pertumbuhan masih terjaga cukup baik meskipun sempat ada perlambatan ekonomi.

“Ini langkah bagus kita harus menjaga momentum pergantian pimpinan. Selain itu kita harapkan pemimpin negara yang baru dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi jangan sampai salah langkah. Karena itu kita berharap besar terhadap pemimpin baru untuk menjaga momentum ekonomi kita,” harapnya.

Disinggung makna kemerdekaan RI ke-69, Hatta mengatakan, angka 69 merupakan angka yang cukup dewasa dan besar. “Saya mengharapkan Indonesia menjadi negara besar bahkan dengan demografis yang hebat ini sayang



Anggota DPR Mohammad Hatta

sekali kita tidak memanfaatkan potensi kita,”katanya.

Dia mengharapkan, APBN 2015 harus lebih cermat dengan mengarahkan program keuangan yang pro rakyat seperti kesehatan, pendidikan. “Saya juga berharap itu merupakan komitmen bersama siapapun Presiden terpilih harus menjaga hal itu. Selain itu, juga diharapkan Kabinet baru tidak terlalu frontal sehingga parlemen juga dapat terjaga,” paparnya. (si)

## Sosialisasi Kenaikan BBM Harus Dilakukan Secara Masif

Mulai 1 Agustus lalu, pemerintah sudah memberlakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk Kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun diturunkan dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Namun, DPR menilai upaya pengendalian dan pembatasan yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir ini hanyalah solusi yang bersifat jangka pendek.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat membacakan pidato pembukaan masa persidangan 1, di Gedung Nusantara, Jumat (15/08). Ia menyatakan, pemerintah harus mengambil kebijakan yang berorientasi jangka panjang dalam terkait konsumsi BBM di tanah air.

“Pengurangan beban subsidi melalui kebijakan kenaikan harga BBM secara bertahap, dengan diikuti berbagai kebijakan mitigasi serta percepatan pengembangan, baik produksi maupun penggunaan energi alternatif merupakan pilihan yang bisa dijalankan



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

oleh pemerintah. Namun, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif, terencana dan terukur terlebih dahulu kepada masyarakat,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.

Tak dipungkiri, besarnya alokasi anggaran untuk Subsidi terus menjadi sorotan dalam pembahasan RAPBN. Selama kurun waktu tahun 2010 – 2014, alokasi belanja subsidi BBM mencapai

17,84 persen dari Belanja Pemerintah Pusat. Efeknya, angka subsidi yang begitu besar tersebut berimplikasi terhadap semakin beratnya beban APBN dalam menjalankan program-program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Beban tersebut, tambah Pramono menjadi semakin berat jika memperhatikan bahwa besaran subsidi tersebut tidak bisa terlepas dari volatilitas nilai tukar rupiah dan pergerakan harga komoditas BBM di pasar global.

“Disisi lain, bahwa kebijakan subsidi BBM yang selama ini diterapkan tidak tepat sasaran atau lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas dibandingkan rakyat miskin yang semestinya mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, upaya pemerintah yang berorientasi jangka panjang sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan,” tegas Pramono. (sf) foto: tim/parle/hr.

## Indonesia Ingin Perdamaian Abadi di Palestina

DPR dan rakyat Indonesia benar-benar prihatin atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza Palestina. Serangan brutal Militer Israel telah menewaskan lebih dari 1.600 warga Palestina, dimana sebagian besar korban adalah penduduk sipil, wanita, anak-anak dan orang tua.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Pramono Anung ketika membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I tahun 2014 di depan Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8) siang.

Pada acara yang dihadiri Presiden SBY dalam rangka menyampaikan Pengantar RAPBN 2015 dan Nota Keuangannya, Pramono Anung lebih jauh menyebutkan, akibat serangan brutal Israel tersebut, lebih dari 2.500 rumah hancur, tempat peribadatan, sekolah-sekolah, bahkan sekolah yang dikelola PBB dimana terdapat 3.000 pengungsi Palestina.

DPR dan seluruh rakyat Indonesia mengutuk setiap kekerasan yang mengakibatkan bencana kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Indonesia mengharapkan dapat dicapai



Wakil Ketua DPR Pramono Anung membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I tahun 2014

kesepakatan damai yang permanen dengan melibatkan PBB dan pihak-pihak lain yang terkait. “Indonesia senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina, oleh karena itu, Indonesia berkeinginan tercapainya perdamaian abadi di bumi Palestina,” ungkap Pramono.

Selain masalah Palestina, DPR-RI menaruh perhatian atas musibah jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH-17 pada 17 Juli 2014 di wilayah timur Ukraina, yang menewaskan ratusan korban termasuk 12 (duabelas) korban warga negara Indonesia. Dewan menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap tragedi tersebut.

“DPR menyerukan dan mendesak badan PBB agar investigasi secara internasional terus dilakukan, mengingat penembakan pesawat sipil oleh senjata militer merupakan pelanggaran hukum internasional,” pungkas Pramono. (mp) foto: tim/parle/hr.

## Pelaksanaan PNPM Berkembang Pesat



Presiden menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 kepada Pimpinan DPR dan DPD

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mengalami perkembangan pesat. Setidaknya seperempat penduduk Indonesia atau sekitar 60%, baik di desa maupun di kota telah menikmati manfaat program ini.

Demikian disampaikan Presiden SBY saat berpidato di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (15/8). “Di ribuan lokasi program PNPM, rakyat menentukan sendiri kegiatan ekonomi yang ingin dilakukannya, menentukan anggaran yang dibutuhkan dari dana PNPM dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel. Ini adalah contoh konkrit di mana kemitraan antara pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat secara riil mengubah nasib rakyat,” ungkap Presiden.

Seperti diketahui, PNPM merupakan program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM ini dilakukan dengan memberi pendampingan dan pemberian dana stimulan agar masyarakat mampu berinovasi dan mandiri mengatasi kemiskinannya.

“Dari perjalanan saya keliling Tanah Air, saya selalu mendengar harapan dari masyarakat agar program PNPM ini dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan,” aku Presiden lebih lanjut. Untuk itulah, pemerintah juga sedang menggiatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejauh ini, akses financial masih menjadi senjata ampuh menanggulangi kemiskinan di Tanah Air.

KUR sendiri merupakan modal kerja atau investasi bagi UMKM di bidang

usaha produktif dan layak tapi belum berkembang dengan baik. Pemerintah menyediakan bantuan modal kerja dengan plafon hingga Rp 500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Pemerintah sendiri, lanjut Presiden, terus memperbaiki pola penyaluran KUR dan jumlah bank penyalur KUR juga sudah ditambah dari 6 bank menjadi 33 bank.

“Selama 7 tahun terakhir penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp150 triliun dan diterima oleh sekitar 11 juta debitur, dengan tingkat kredit macet atau non-performing loan hanya 4 persen. Ini bukti yang nyata bahwa jika rakyat kita mendapatkan peluang dan bantuan untuk mengubah nasibnya, maka mereka akan berusaha keras untuk tidak menyianyikan kepercayaan tersebut,” ucap Presiden. (mh) foto: tim/parle/hr.

# Pendidikan Harus Berikan Ruang Bagi Orang Miskin



Anggota DPR RI Fary Djemy Francis

Terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, pertama bagaimana menjaga kewibawaan

negara Indonesia, kedua menentukan kualifikasi pemimpin kita untuk menjaga momentum keberhasilan sekarang, terakhir yaitu performance pemimpin negara kita.

Pendapat itu disampaikan oleh Anggota DPR dari Gerindra Fary Djemy Francis saat ditanyakan tantangan Indonesia kedepan, di Gedung Nusantara, Jumát, (15/8).

Menurut Fary, pidato kenegaraan SBY menggambarkan perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari tahun 1945 terkait status bangsa kita, sampai dengan tahun 1962. “Saat ini kita telah mengalami kemajuan yang sangat pesat disamping itu juga masih adanya

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera,”paparnya.

Dia menambahkan, PR yang utama yaitu bagaimana memberikan ruang bagi orang miskin untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. “Hal itu digambarkan jelas oleh SBY dalam pidatonya dimana seorang anak tukang becak bisa menjadi sarjana dan memperoleh IPK 39.6,”terangnya.

Selain itu, lanjutnya, pada awal kemerdekaan utang kita mencapai 80 persen sekarang tinggal 30 persen utang kita dari PDB. “Ini semua harus dijaga, dipelihara, dan harus didorong untuk lebih maju lagi,” katanya. (si) foto: iwan armanias/parle/hr.

## Defisit Anggaran RAPBN 2015 Diperkirakan 257 Triliun

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU RAPBN 2015 beserta Nota Keuangannya menyatakan total pendapatan negara pada tahun anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp.1.762,3 triliun.

Pendapatan tersebut didapatkan dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.370,8 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.388,0 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp.3,4 triliun.

Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp.2.019,9 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp.1.379,9 triliun, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp.640,0 triliun.

“Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah sebesar Rp.257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap APBNP,” jelas Presiden RI.

Presiden menjelaskan, pada RAPBN 2015 direncanakan terdapat tujuh Kementerian dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar, di atas Rp 40 triliun. Ketujuh Kementerian tersebut adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Sedangkan, untuk anggaran belanja non kementerian direncanakan sebesar Rp.779,3 triliun, meliputi belanja subsidi Rp.443,5 triliun. Sementara anggaran subsidi energi sebesar Rp.363,5 triliun, dan subsidi non energi sebesar Rp.70 triliun.

Presiden menyatakan, dalam RAPBN 2015 dialokasikan anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp.154 triliun.

“Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir ini, kita telah berhasil melakukan strategi pengelolaan utang negara, ditunjukkan melalui penurunan rasio pembayaran utang terhadap belanja Pemerintah Pusat dari 14,9% pada tahun 2009, menjadi 10,6% pada 2014,” tambah Presiden. (sf) foto: tim/parle/hr.



# PIMPINAN, ANGGOTA DPR RI DAN KARYAWAN SETJEN DPR RI MENGUCAPKAN DIRGAHAYU RI





Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat menerima Delegasi Konggres AS Rodney Frelinghuyusen, Kay Granger, Ken Calvert dan Jim Moran, Senin (11/8). Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso didampingi Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji membuka Pembekalan dan Pemanthapan Pimpinan Tingkat Nasional Anggota DPR RI Periode 2014-2019, Jumat (8/8) Foto: Andry/Parle/Hr.



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau perumahan rakyat di Sungai Andai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (11/8). Foto: Sugeng/Parle/Hr.